

**PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM  
(DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
TERHADAP BELANJA MODAL**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



oleh :

**ANANG YUNUS RIFA'I**

**NIM : 2012310960**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2018**

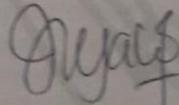
## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anang Yunus Rifa'i  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 13 September 1994  
N.I.M : 2012310960  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal

Disetujui Dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing,

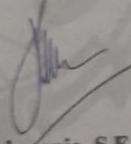
Tanggal: 18/05/18



( Divah Pujiati, S.E., M. Si )

Co. Dosen Pembimbing,

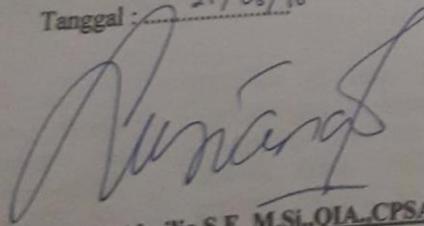
Tanggal: 21/05/18



( Nur'sini Rokhmania, S.E., Ak., M. Ak )

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: 21/05/18



( Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., OIA., CPSAK )

**THE EFFECT OF REGIONAL TAX, GENERAL ALLOCATION FUNDS  
(DAU) AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) AGAINST  
ALLOCATION OF CAPITAL EXPENDITURE**

**ANANG YUNUS RIFA'I**

**2012310960**

[anangyunusrifai@gmail.com](mailto:anangyunusrifai@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine whether the Regional Tax, General Allocation Funds and Special Allocation Fund affect the allocation of Capital Expenditure in all Province of Indonesia. The population and sample of this study were 34 Province of Indonesia. The type of this research is using quantitative method that focuses on hypothesis testing, the data analyzed, its measured and the resulting conclusion is generalization. Data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). Methods of data collection conducted by documentation method from secondary data source by collecting, recording, and processing data related to research for 3 years, that is year 2014-2016. Data analysis used in this research is multiple linear regression with SPSS application tools (Statistical Product and Service Solutions). The results of this study prove that local taxes and special allocation funds significantly influence the allocation of capital expenditure in the province government of Indonesia. While the general allocation funds variable does not affect the allocation of capital expenditure in the province government of Indonesia.*

*Keywords: Local Taxes, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures, Realized Budget Reports.*

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan di berlakukannya tentang Pemerintah Daerah. UU No. 32 tahun 2004 dan

UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perkembangannya pertama regulasi ini diperbaharui

dengan UU No. 23 Tahun 2014 babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi secara baik dan menjalankan kedisiplinan anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktifitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyusunan anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam pemerintah daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

[Republika.co.id](http://Republika.co.id) yang diakses pada tanggal 24 September 2017, Pemangkasan dana transfer ke pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (RAPBN) 2017 membuat sejumlah daerah cemas. Daerah lain khawatir kebijakan pemerintah pusat ini justru menghambat pembangunan daerah, utamanya pada proyek strategis daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, terkendala proyek strategis ini tentu membuat pertumbuhan ekonomi di daerah akan terhambat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2014 hingga 2016 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Pemilihan periode waktu tersebut dengan menggunakan data 3 tahun terakhir dari penyusunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal di daerah pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga dimotivasi masih adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini penting dilakukan karena penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda. Dengan adanya *gap* dari penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas dan adanya fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DI SELURUH INDONESIA**”

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Pajak Daerah**

Pendapat dari Kesit Bambang (2003:2) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang, namun dapat dipaksakan terhadap undang-undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya. Jenis pajak daerah terdiri dari pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuannya, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Abdul Halim (2004:54) mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam 29 APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 28 Tahun 2009). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

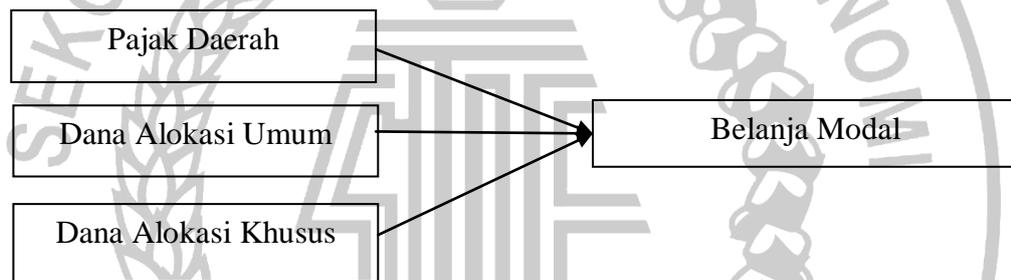
Penetapan jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah dana alokasi khusus (DAK) dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana

perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja

### **Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1**

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan tentang penelitian ini yaitu mengetahui tentang pengaruh pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dalam penelitian ini data yang digunakan jenis data sekunder sebagai sumber data yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan karakteristik permasalahan, peneliti ini

modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan. Belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

### **Kerangka Pemikiran**

digolongkan dalam penelitian kausal komparatif. Penelitian ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti mengidentifikasi fakta peristiwa sebagai variabel-variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel dependen.

### **BATASAN PENELITIAN**

Penelitian tersebut dilakukan di Provinsi se-Indonesia sebagai lokasi penelitian, dengan melihat data realisasi anggaran belanja daerah (APBD) di tahun 2014 dan 2016. Pemilihan Provinsi se-Indonesia dikarenakan peneliti ingin mengatahui provinsi mana yang

memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal. Dengan tujuan untuk memperoleh data yang layak untuk diuji.

### Identifikasi Variabel

Variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen adalah Belanja Modal.

Variabel bebas (X)

Variabel bebas (variabel independen), yaitu :

$X_1$  = Pajak Daerah

$X_2$  = Dana Alokasi Umum

$X_3$  = Dana Alokasi Khusus

### Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek. Unit analisis penelitian ini yaitu pajak daerah, DAK, dan DAU diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang berjumlah 34 Provinsi.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Provinsi di Indonesia yang melaporkan data keuangan daerahnya kesitus dirjen perimbangan keuangan daerah dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *sampling* jenuh (*sampling* sensus). *Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015:96).

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### Teknik Analisis Data Analisis Data Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan /menceritakan hasil penelitian di lapangan terutama yang berkaitan dengan responden penelitian. Analisis ini berguna untuk menggambarkan objek penelitian dan menggambarkan responden penelitian yang diteliti. Analisis deskriptif ini menjelaskan mengenai distribusi dari masing-masing variabel, yaitu : variabel bebas atau independen yang meliputi pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta variabel terikat atau dependen yaitu belanja modal.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi persyaratan lolos dari asumsi klasik. Uji klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, data harus terdistribusi secara normal, tidak

mengandung autokorelasi. Untuk itu, sebelum melaksanakan pengujian terhadap regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier yaitu studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel independen bertujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen

#### Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan nilai

#### Uji T (Uji Parsial)

Uji t berguna untuk menguji masing-masing variabel bebas atau

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Gambaran Subyek

Tabel 4.1  
Karakteristik Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah Data 2014	Jumlah Data 2015	Jumlah Data 2016	Jumlah
Jumlah Provinsi di Indonesia	34	34	34	102
Provinsi yang tidak melaporkan APBD 2014-2016	(2)	(2)	(1)	(4)
Jumlah data setelah melalui proses eliminasi	32	32	33	97
Outlier				(25)
Jumlah data selama 3 tahun yang bisa dijadikan sampel				72

Berdasarkan tabel 4.1 Setelah terkumpul sebanyak 34 Provinsi di

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

### Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan analisis regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji pengaruh simultan (uji statistik F), dan uji parsial (uji statistik t).

Adjusted  $R^2$  untuk mengevaluasi yang mana model regresi terbaik. Apabila satu atau lebih variabel dependen ditambahkan kedalam model maka nilai Adjusted  $R^2$  akan berubah.

independen secara parsial (individu) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Indonesia kemudian data tersebut di eliminasi sesuai dengan kriteria yang

ada di dalam penelitian. Pada proses eliminasi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang tidak melaporkan datanya ditahun 2014-2016 ada 4 Provinsi. Data yang terkumpul setelah melalui proses eliminasi sesuai dengan kriteria berjumlah total

97 Provinsi pada periode tahun 2014-2016. Data 97 Provinsi tersebut mengalami outlier sejumlah 25 sampel. Sehingga sampel akhir yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 72 sampel pada tahun 2014-2016.

## Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2  
UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM_Y	72	232424743	1677004074	714069613,62	325538591,070
PD_X1	72	145451712	4686574138	1300538175,06	1159200092,600
DAU_X2	72	571244699	1604505673	1041419757,74	214188074,220
DAK_X3	72	12538478	719033950	144659892,12	147202385,869

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif secara keseluruhan untuk variabel dependen belanja modal dan variabel independen pajak daerah, dana alokasi umum (DAU) dan dana aloaksi khusus (DAK). Dari Tabel tersebut dapat terlihat rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk tiap variabel independen. Nilai rata-rata pajak, dana alokasi umum lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, artinya variasi data untuk variabel pajak, dana alokasi umum lebih heterogen. Nilai rata-rata belanja modal dan dana alokasi khusus lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, artinya variasi data untuk variabel belanja modal dan dana alokasi khusus bersifat homogen.

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui Nilai Belanja Modal untuk di tahun 2014-2016, nilai belanja modal terkecil (*minimum*) adalah Rp

232.424.743 dimiliki oleh Provinsi Gorontalo pada tahun 2014 dikarenakan dikarenakan pada Provinsi Gorontalo memiliki wilayah yang tidak begitu luas dan jumlah penduduk yang hanya 1,116 Juta penduduk sehingga untuk pembangunan pelayanan sarana dan prasarana layanan publik hanya sedikit, sedangkan terbesar (*maximum*) adalah Rp. 1.677.004.074 dimiliki oleh Provinsi Papua Barat tahun 2015, dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan percepatan pembangunan di luar pulau Jawa khususnya Provinsi Papua Barat, hal tersebut selaras dengan program pemerintah pusat agar papua dapat mengejar ketertinggalan dengan provinsi-povinsi lain sehingga fasilitas pelayanan sarana dan prasarana dapat dioptimalkan serta dapat menunjang kegiatan ekonomi. Rata-rata (*mean*) nilai Belanja Modal

di tahun 2014-2016 adalah Rp. 714.069.613. Standar deviasi Belanja Modal di tahun 2014-2016 adalah Rp. 325.538.591 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data atau dengan kata lainnya belanja modal menunjukkan nilai yang baik.

Diketahui pajak daerah pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 1.300.538.175,06, Sedangkan nilai standart deviasi data pajak daerah 1.159.200.092,6 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data kecil dan data bersifat homogen karena sedikitnya variasi data atau dengan kata lainnya belanja modal menunjukkan nilai yang baik. Jumlah Pajak daerah yang terkecil selama tiga tahun terakhir adalah Provinsi Maluku Utara tahun 2014 dengan jumlah Rp. 145.451.712 sedangkan nilai pajak daerah yang terbesar atau maximum dimiliki Provinsi Banten tahun 2015 dengan jumlah Rp. 4.686.574.138, karena wilayahnya termasuk kawasan megapolitan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang dianggap masyarakat Indonesia sebagai kawasan strategis nasional dan jumlah penduduknya yang banyak sehingga memiliki nilai pajak daerah yang cukup tinggi.

Diketahui dana alokasi umum pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 1.041.419.757,7, Sedangkan nilai standart deviasi data dana alokasi umum sebesar 214.188.074,2 yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan nilai

rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat homogen, karena banyak variasi data.

Jumlah dana alokasi umum yang terkecil selama tiga tahun terakhir adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 571.244.699 sedangkan nilai dana alokasi umum yang terbesar (*maximum*) adalah Provinsi Sumatra Utara yaitu sebesar Rp. 1.604.505.673, karena pada Provinsi Sumatra Utara memiliki dana alokasi umum yang tinggi karena banyak sektor-sektor yang dapat dikembangkan di Provinsi tersebut, terlebih Provinsi Sumatra Utara adalah salah satu provinsi besar di Pulau Sumatra, dikarenakan Ibu Kota Provinsi Sumatra Utara adalah Kota Medan yang termasuk kota terbesar ke-3 di Indonesia setelah Kota Surabaya, dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak di bandingkan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatra sehingga dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat cukup tinggi untuk membiayai setiap kegiatan di daerahnya.

Diketahui bahwa dana alokasi khusus pada tahun 2014-2016 mempunyai nilai rata-rata 144.659.892,1, Sedangkan nilai standart deviasi 147.202.385,9 yang berarti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata. Dapat dikatakan bahwa rentang data besar dan data bersifat heterogen, karena banyak variasi data.

Jumlah dana alokasi khusus minimum 12.538.478 dimiliki oleh Provinsi Banten tahun 2014, sedangkan yang tertinggi menerima dana alokasi khusus dengan jumlah sebesar 719.033.950 dimiliki oleh

Provinsi DI Yogyakarta di tahun 2016, karena banyak sektor-sektor yang dapat dikembangkan di

Provinsi DI Yogyakarta yang membutuhkan dana alokasi khusus untuk membiayai setiap kegiatannya.

### Uji Normalitas

Tabel 4.4  
UJI NORMALITAS (Sesudah *Outlier*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	72
Kolmogorov-Smirnov Z	0,876
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,427

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada tabel 4.3 menunjukkan nilai 0,876 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,427. Karena hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan signifikansi diatas 0,05

(sebesar 0,427). maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik distribusi dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

TABEL 4.5  
UJI MULTIKOLINEARITAS

	Model	Collinearity Statistics	
		<i>Tolerance</i>	VIF
<b>Pajak Daerah</b>		0,970	1,031
<b>Dana Alokasi Umum</b>		0,913	1,095
<b>Dana Alokasi Khusus</b>		0,901	1,110

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pajak sebesar 0,970, dana alokasi umum (DAU) 0,913, dan dana alokasi khusus (DAK) 0,901, Ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,1 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama juga dilihat dari

nilai VIF ketiga variabel independen yang menunjukkan angka dibawah 10 yang pertama adalah pajak daerah memiliki nilai VIF 1,031, selanjutya dana alokasi umum (DAU) memiliki nilai VIF 1,095 dan yang terakhir adalah dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai VIF 1,110. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas antar variabel

## Uji Autokorelasi

**Tabel 4.6**  
UJI AUTOKORELASI

Model	Durbin-Watson
1	1,832

Dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,832. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 72 dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ). Maka dari tabel Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah ( $d_l$ ) sebesar 1.5325 dan nilai batas atas ( $d_u$ ) sebesar 1,7054. Berdasarkan dari data tersebut, dapat diketahui bahwa nilai DW 1,832 lebih besar dari nilai batas atas ( $d_u$ ) 1,7054 dan kurang dari  $4 - 1,7054$  ( $4-d_u$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima atau dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

## Uji Heteroskedastisitas

**TABEL 4.7**  
HASIL UJI GLETSER

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	264765430,003	106569791,399		2,484	,015
PD_X1	,004	,019	,028	,227	,821
DAU_X2	-,051	,104	-,062	-,491	,625
DAK_X3	-,037	,152	-,031	-,242	,809

Untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikan yaitu pajak daerah sebesar 0,821, dana alokasi umum sebesar 0,625 dan dana alokasi khusus sebesar 0,809. Dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Ststistik F

**Tabel 4.8**  
HASIL UJI STATISTIK F

Model	F	Sig.
1 regression	8,819	0,000 <sup>b</sup>

Berdasarkan hasil dari tabel 4.8 tersebut menunjukkan hasil uji ANOVA atau *F test* diatas, di dapat

nilai F sebesar 8,819 dengan tingkat probabilitas (signifikan) sebesar 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dibawah tingkat signifikansi

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel independen

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, model regresi fit.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
1	<b>0,280</b>	<b>0,248</b>

Berdasarkan dengan tabel 4.9 dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,248. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak daerah, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus sebesar 24,8 persen, sedangkan sisanya 0,752 atau 75,2 persen (1 - 0,752) dapat dipengaruhi variabel lain diluar model. Kemudian nilai *Std. Error of the Estimate* sebesar 282239482,9.

### Uji Parsial Atau T

**Tabel 4.10**  
**UJI PARSIAL ATAU T**

Model	T	Sig.
Constant	<b>1,169</b>	<b>,247</b>
PD_X1	<b>4,188</b>	<b>,000</b>
DAU_X2	<b>1,684</b>	<b>,097</b>
DAK_X3	<b>2,029</b>	<b>,046</b>

1. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1)

Pada hipotesis pertama yang dibuat oleh peneliti adalah pajak daerah. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung pajak daerah memperoleh hasil sebesar 4,188 dengan signifikansi sebesar 0,000. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 (0,000 < 0,005), sehingga Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi

belanja modal. Semakin besar pendapatan pajak daerah dalam suatu daerah maka alokasi belanja modal yang di lakukan akan semakin meningkat.

2. Hasil Uji Hipotesis Yang Kedua (H2)

Pada hipotesis kedua yang dibuat oleh peneliti adalah retribusi daerah. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung dana alokasi umum (DAU) memperoleh hasil sebesar 1,684 dengan signifikansi sebesar 0,097. Diketahui

bahwa nilai signifikan lebih dari 0.05 ( $0,097 > 0,005$ ), sehingga  $H_0$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### 3. Hasil Uji Hipotesis Yang Ketiga ( $H_3$ )

Pada hipotesis ketiga yang dibuat oleh peneliti adalah dana alokasi khusus (DAK). Pada tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung dana alokasi khusus memperoleh hasil

#### Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.17  
UJI REGRESI LINEAR BERGAN DA

Model	Unstandardized coefficients	Sig
	B	
Constant	<b>196.894.557,9</b>	<b>,247</b>
Pajak daerah	<b>,123</b>	<b>,000</b>
Dana alokasi umum	<b>,276</b>	<b>,097</b>
Dana alokasi khusus	<b>,486</b>	<b>,046</b>

Dari tabel diatas diketahui nilai constant sebesar 196.894.557,9 sedangkan nilai signifikansi pajak daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,123. DAU ( $X_2$ ) sebesar ,276. DAK ( $X_3$ ) sebesar 0,486. Dari nilai tersebut dapat disusun regresi linier berganda sebagai berikut ini :

Alokasi belanja Modal =  $196.894.557,9 + 0,123PD\_X_1 + 0,486DAK\_X_3$

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Konstanta (nilai milik Y) sebesar 196.894.557,9 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka alokasi

sebesar 2,029 dengan signifikansi sebesar 0,046. Diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0.05 ( $0,046 < 0,005$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Semakin besar pemberian dana dari pemerintah khususnya dana alokasi khusus dalam suatu daerah maka alokasi belanja modal yang di lakukan akan semakin meningkat.

Belanja Modal setiap daerah sebesar 196.894.557,9 (dalam ribuan rupiah).

- 2 Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,123 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan pajak daerah sebesar Rp. 1.000 maka akan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal sebesar Rp. 123.

- 3 Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,486 menyatakan bahwa setiap ada kenaikan retribusi sebesar Rp. 1.000 maka akan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal sebesar Rp. 486.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian H1 diterima, sehingga hipotesis pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal diterima, ini berarti jika pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap Belanja Modal.

Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang menggambarkan kemandirian dari suatu daerah dan mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal, ini berarti di provinsi seluruh Indonesia dari tahun 2014-2016 mengalokasikan pajaknya untuk belanja modal.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016) dan Virgini Gabriela (2016) yang menyimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang terhadap belanja modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Valencia (2015) yang menyatakan secara parsial variabel pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan dari pajak yang kurang sehingga mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai belanja modalnya.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian H2 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal adalah ditolak atau dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Hal ini terjadi karena adanya anggapan yang memperjelas bahwa pandangan masyarakat tentang belanja modal pada pemerintah provinsi didanai oleh pendapatan asli daerah provinsi, bukan dari dana alokasi umum. Karena masyarakat menilai bahwa pendapatan asli daerah provinsi jumlahnya yang sangat besar sehingga dana alokasi umum hanya untuk menutupi defisit anggaran dari pemerintah provinsi dan sebagian ditransfer ke kabupaten dan kota di wilayah provinsi tersebut.

Dalam penelitian ini memperjelas bahwa belum sepenuhnya belanja daerah di provinsi seluruh Indonesia digunakan sebagai pemenuhan kesejahteraan publik atau masyarakat, sebab pengelolaan belanja daerah terutama kenaikan penerimaan dana alokasi umum tidak menyebabkan terjadinya peningkatan pada belanja modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Robin Keswando (2016) dan Maria Valencia (2015) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adri Tolu (2016), Susi Susanti (2016), I Made (2015) dan Ni Luh (2014) yang menyimpulkan, secara parsial

dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian H3 diterima, sehingga hipotesis pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal diterima, yang berarti jika dana alokasi khusus suatu daerah meningkat maka akan meningkatkan belanja modal.

Menurut (Nordawati dan Ayunigtiayas, 2010:26) DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlan (2016), Yunistin Ndede (2016) dan Ni Luh (2014) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana alokasi khusus terhadap Belanja Modal, tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri Tolu (2016), Robin Keswando (2016), I Made (2015) dan Maria Valencia (2015) menyatakan bahwa dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Dana alokasi umum (DAU) dan Dana alokasi khusus (DAK) terhadap alokasi belanja modal. Sampel penelitian adalah 72 observasi dari 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal ini berarti, jika pendapatan pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal.
2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Dari segi pendapatan dana alokasi umum (DAU) mampu memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk mempengaruhi yang lebih spesifik seperti belanja modal, dana alokasi umum (DAU) yang bersifat umum (tidak adanya kriteria-kriteria dari pemerintah pusat) hanya mampu memberikan pengaruh yang kecil dan masih belum mampu memberikan kontribusi terhadap alokasi belanja modal. Karena banyaknya tanggapan masyarakat bahwa dana alokasi umum (DAU) hanya untuk menutupi defisit anggaran dari pemerintah daerah provinsi. Dengan terjadinya hal tersebut membuat pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal masih

belum maksimal terhadap pembangunan sektor ekonomi.

3. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal ini berarti, jika penerimaan dana alokasi khusus (DAK) meningkat maka akan meningkatkan pengalokasian terhadap belanja modal

#### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan – keterbatasan tersebut antara lain :

1. Dalam penelitian ini masih terdapat provinsi yang tidak melaporkan data laporan pendapatan dan pengeluarannya.
2. Informasi yang peneliti dapatkan kurang mendetail atau bisa dikatakan kurang transparan, karena sewajarnya informasi mengenai penerimaan dan kegunaan APBD dapat dipublikasikan supaya masyarakat dapat mengetahui alokasi APBD di provinsinya.
3. Faktor-faktor penentu belanja modal yang hanya sebatas bersumber pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dilihat atau diambil dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sehingga diperlukan adanya tambahan variabel yang terkait lainnya.

#### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran-saran yang

mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Pemerintah daerah Provinsi se-Indonesia, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi meningkatkan pengawasan atas alokasi biaya yang dikeluarkan disetiap daerah agar penggunaannya efektif, efisien dan ekonomis, serta peneliti mengharapkan semua pemerintah provinsi di Indonesia agar melaporkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) baik penerimaan maupun pengeluaran daerah provinsi di Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, agar masyarakat di daerah dapat mengetahui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah provinsinya. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan inspeksi mendadak dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- b. Penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi belanja modal, misalnya jenis-jenis atau ukuran penerimaan pemerintah daerah provinsi lainnya maupun variabel non keuangan, seperti jumlah penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak yang digunakan untuk

membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik dari pada daerah dengan jumlah penduduk sedikit.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan, dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan menambahkan variabel independen yang lain untuk memperoleh hasil yang lebih relevan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Andreas Marzel Pelealu. 2013. "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4 Hal. 1189-1197*.
- Andri Tolu, Een Walewangko, dan Steeva Y.L. Tumangkeng. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Kota Bitung)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 02. Epaper Republika (Bandar Lampung). 24-09-2017, hal 1*.
- Aprizay, Yudi Satray, dan Darwanis. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala. Hal :140-149*.
- Arifin. 2005. *Tinjauan Perspektif Teori Keagenan (Agency Theory)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur (<http://www.bps.go.id>. Diakses 30/03/2017)
- Beta Asteria. 2015. "Analisi Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Jurnal Riset Manajemen. Vol. 2 No. 1 Pp. 51-61*.
- Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Belanja Modal dan Pengeluaran Investasi Pemerintah*. Artikel online melalui(<http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Diakses pada 22/09/2016).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik

- Indonesia. 2015. *Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Reboisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. Artikel online melalui(<http://www.djpk.depkeu.go.id>). Diakses pada 18/09/2017).
- Eisenhart Kathleem. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*, 14. Hal 57-74.
- Epapper Tribunnews (Bali). 1-03-2016, hal 1.
- Epapper Republika (Bandar Lampung). 24-09-2017, hal 1.
- Hasbiullah, 2015. *Ekonomi publik suatu perbandingan konsep ekonomi islam dengan teori konvensional*. Makassar. Alauddin University Press.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- I Made Dwi Suhendra, Ni Luh Gede Erni Slindawati, dan I Made Pradana Adiputra. 2015. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013". *e-Journal SI AkUniversitas Pendidikan Ganesha Vol. 3 No. 1*.
- Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Kesit Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Pres.
- Maria Valencia Wahyudi, dan Nur Handayani. 2015. "Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK terhadap Anggaran Belanja Modal". *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 11*.
- Ni Luh Dina, Wayan Cipta, dan I Wayan Suwendra. 2014. "Pengaruh Pemdapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bulelelmg". *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Vol. 2*.
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.

- Nurlan Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks, Jakarta
- Pheni Chalid. 2005. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan.
- Ramlan, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 5, No. 2.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 09 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia No 09 Tahun 2015 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Robin Kewando, Suharno, dan Djoko Kristianto. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 1
- Samad S. 2005. "Unraveling the Organizational Commitment and job Performance Relationship: Exploring the Moderating Effect of Job Satisfaction". *The Business Review*. Vol. 4 Pp. 79-84.
- Stepvani Uhise. 2013. "Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4. Hal. 1677-186.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Susi Susanti, dan Heru Fahlevi. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1, No. 1, Hal. 183-191.
- Umar Husein. 1999. *Metode Penelitian: Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Virgini Gabriela Runtu, Een Novritha Walewangko, dan Krest D Tolosang.

2016. "Pengaruh Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Modal Kota Manado (Periode 2005-2015)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 03*.

William R Scott. 2003. *Financial Accounting Theory*. International Edition, New Jersey : Prentice-Hall. Inc

Yunistin Ndede, Jullie J. Sondakh, dan Wiston Pontoh. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Manado". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 13*.

